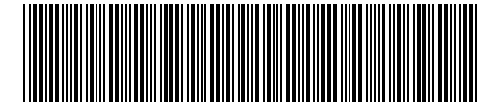




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.667799/2021**



DS:3800-7808-9023-3270

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  |
| 2. Unit Organisasi            | : (10)     | Badan Pembinaan Hukum Nasional  |
| 3. Provinsi                   | : (34)     | SULAWESI BARAT  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (667799) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT   |
| Sebesar                       | : Rp.      | 942.983.000 ( SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	942.983.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                |           |             |
|----------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN MAMUJU | (178) Rp. | 942.983.000 |
|----------------|-----------|-------------|

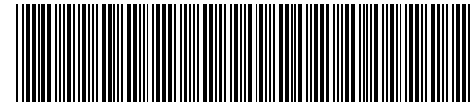
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2021**



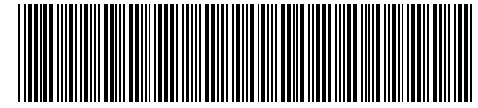
DS:3800-7808-9023-3270

Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

---

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	103.973.000
BB.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	103.973.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	839.010.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	839.010.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



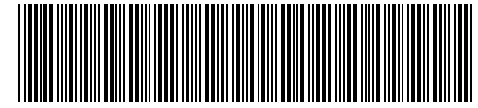
DS:3800-7808-9023-3270

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			103.973.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			103.973.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	103.973.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	103.973.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			839.010.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			839.010.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5,00	Lembaga	103.212.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	Lembaga	103.212.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12,00	Kelompok Masyarakat	155.000.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	10,00	Kelompok Masyarakat	52.504.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	102.496.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3800-7808-9023-3270

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		4,00	Lembaga	62.468.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	4,00	Lembaga	62.468.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		4,00	Lembaga	59.640.000
Rincian Output		:	01	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (PN)	4,00	Lembaga	59.640.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		48,00	Orang	384.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	48,00	Orang	384.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		7,00	Kelompok Masyarakat	74.690.000
Rincian Output		:	01	QBC.001	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	7,00	Kelompok Masyarakat	74.690.000

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

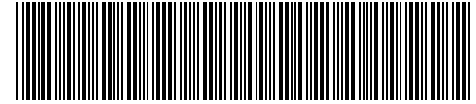
ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2021**

**I B. SUMBER DANA**



DS:3800-7808-9023-3270

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
 Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	942.983.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	942.983.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

Pagu

Ekuivalen Rupiah

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3800-7808-9023-3270

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667799	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	-	936.983	6.000	-	-	942.983		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	103.973	-	-	-	103.973		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	103.973	-	-	-	103.973		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	103.973	-	-	-	103.973	34 . 51	
01	RM	-	103.973	-	-	-	103.973	178	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	833.010	6.000	-	-	839.010		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	833.010	6.000	-	-	839.010		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	97.212	6.000	-	-	103.212	34 . 51	
01	RM	-	97.212	6.000	-	-	103.212	178	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	155.000	-	-	-	155.000	34 . 51	
01	RM	-	155.000	-	-	-	155.000	178	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3800-7808-9023-3270

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	62.468	-	-	-	62.468	34 . 51	
01	RM	-	62.468	-	-	-	62.468	178	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	59.640	-	-	-	59.640	34 . 51	
01	RM	-	59.640	-	-	-	59.640	178	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	384.000	-	-	-	384.000	34 . 51	
01	RM	-	384.000	-	-	-	384.000	178	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	74.690	-	-	-	74.690	34 . 51	
01	RM	-	74.690	-	-	-	74.690	178	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>936.983</b>	<b>6.000</b>	-	-	<b>942.983</b>		

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2021  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3800-7808-9023-3270

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

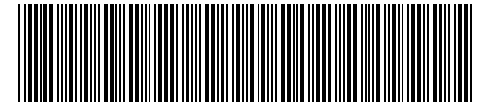
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667799	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	16.943	154.611	112.865	54.681	76.215	68.255	106.797	91.123	165.630	91.873	3.990	942.983
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	11.127	154.611	112.865	54.681	76.188	68.255	106.797	91.114	165.630	91.855	3.860	936.983
		<b>BELANJA MODAL</b>	0	5.816	0	0	0	27	0	0	9	0	18	130	6.000
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	1.574	2.772	52.927	7.038	2.838	9.498	12.106	14.680	160	0	380	103.973
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	1.574	2.772	52.927	7.038	2.838	9.498	12.106	14.680	160	0	380	103.973
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	15.369	151.839	59.938	47.643	73.377	58.757	94.691	76.443	165.470	91.873	3.610	839.010
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	9.553	151.839	59.938	47.643	73.350	58.757	94.691	76.434	165.470	91.855	3.480	833.010
		53 BELANJA MODAL	0	5.816	0	0	0	27	0	0	9	0	18	130	6.000

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2021  
IV A. B L O K I R**



DS:3800-7808-9023-3270

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT  
Kode dan Nama Satker : [667799] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

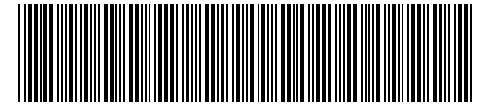
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2021  
IV B. C A T A T A N**



DS:3800-7808-9023-3270

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT  
Kode dan Nama Satker : [667799] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003